

# KEWARGANEGARAAN

Volume 24 : Nomor 01, Juni 2015

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Gerakan Kebudayaan Dalam Usaha  
Mempersiapkan Warga Negara di Abad 21  
**Feriansyah dan Ridho Harta**

Memaknai Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara  
**Apiek Gandamana**

Penerapan Metode *Accelerated Learning* Sebagai Strategi Guru  
Untuk Menciptakan Pembelajaran PKn yang Efektif dan Menyenangkan  
**Nurhadianto**

Pengembangan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  
di Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)  
**Risma Sitohang**

Analisis Hukum Terhadap Pajak Parkir:  
Pintu Masuk Pendapatan Daerah Kota Medan  
**Dessy Agustina Harahap**

Pemahaman Tentang Politik Islam dan Dunia Barat Terhadap Demokrasi  
**Pristi Suhendro L**

Strategi Pengelolaan Potensi Ekonomi Wilayah Perbatasan Indonesia-Singapura  
Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan  
**Prayetno, Budi Ali Mukmin Sarumpaet dan Ramsul Nababan**

Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Kumuh dan Pengelolaannya  
**Julia Ivanna**

Diterbitkan oleh :  
Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan  
Fakultas Ilmu Sosial- Universitas Negeri Medan

ISSN 1693 – 7287

## **JURNAL KEWARGANEGARAAN**

### **Penerbit**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

### **Pembina**

Rektor Universitas Negeri Medan  
Dekan FIS Unimed

### **Penanggung Jawab**

Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

### **Dewan Penyunting Pakar**

Djanius Djamin, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)  
Abdul Muin Sibuea, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)  
Idrus Affandi, Prof. Dr. (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung)  
Ridwan A. Sani, Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)  
Warsono, Prof. Dr. (Universitas Negeri Surabaya, Surabaya)

### **Ketua Penyunting**

Drs. Buha Simamora, SH., MH

### **Pelaksana Penyunting**

Drs. Suady Husein, SH., MS

Drs. Liber Siagian, M.Si

Dra. Yusna Melianti, MH

Drs. Halking, M.Si

Ramsul Nababan, SH

### **Sekretaris Penyunting**

Parlaungan Gabriel Siahaan, SH., M.Hum

### **Alamat Redaksi :**

Jurusan PP-Kn FIS UNIMED

Jl. Williém Iskandar Pasar V Medan K. Pos. 20221

Telp (061) 6625973 – Fak (061) – 6614002

E-mail [PPKn@Plasa.com](mailto:PPKn@Plasa.com)

Jurnal Kewarganegaraan : terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Nopember. Penyunting mengundang para akademisi, guru dan peminat kajian kewarganegaraan untuk mengirim naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil penelitian tentang Pendidikan Kewarganegaraan dari kategori Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Naskah yang dikirim agar mengikuti pedoman penulisan “Jurnal Kewarganegaraan”.


Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi penyunting

Pengantar Redaksi .....iii

**Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran**

 Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Gerakan Kebudayaan Dalam Usaha Mempersiapkan Warga Negara di Abad 21  
**Feriansyah dan Ridho Harta**.....1

 Memaknai Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara  
**Apiek Gandamana**.....12


 Penerapan Metode *Accelerated Learning* Sebagai Strategi Guru Untuk Menciptakan Pembelajaran PKn yang Efektif dan Menyenangkan  
**Nurhadianto**.....23

 Pengembangan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)  
**Risma Sitohang**.....39

**Analisis Hukum**

 Analisis Hukum Terhadap Pajak Parkir: Pintu Masuk Pendapatan Daerah Kota Medan  
**Dessy Agustina Harahap**.....52

**Wacana Demokrasi dan Politik**

 Pemahaman Tentang Politik Islam dan Dunia Barat Terhadap Demokrasi  
**Pristi Suhendro L**.....68

 Strategi Pengelolaan Potensi Ekonomi Wilayah Perbatasan Indonesia-Singapura Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat perbatasan  
**Prayetno, Budi Ali Mukmin Sarumpaet dan Ramsul Nababan**.....79

 Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Kumuh dan Pengelolaannya  
**Julia Ivanna**.....96

## *Pengantar*

### **Redaksi**

*Jurnal Kewarganegaraan* setiap diterbitkan mengacu kepada tiga kategori, yaitu Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Dalam setiap terbit *Jurnal Kewarganegaraan* memuat tema sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Dengan diterbitkannya *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 24 Nomor 01, Juni 2015 menandakan bahwa "*Jurnal Kewarganegaraan*" Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial - Unimed telah terbit sebanyak 24 kali, dan selalu rutin menerbitkan jurnal setiap tahun dua kali yaitu pada bulan Juni dan Nopember.

Pada terbitan kali ini menampilkan tujuh tulisan dan karya ilmiah yang menitikberatkan pada persoalan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Hukum, Demokrasi dan Politik.

Rubrik "**Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran**" yang membahas tentang Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai gerakan Kebudayaan Dalam Usaha Mempersiapkan Warga Negara di Abad 21 oleh **Feriansyah dan Ridho Harta**, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai gerakan kebudayaan di abad 21 dengan melalui : *Pertama*, Paradigma pembangunan sangat mempengaruhi program pendidikan di suatu negara. Program pembangunan ekonomi abad 21 berbasis peradaban digerakkan oleh warga negara yang berkualitas dan beradab. warga negara yang berkualitas dan beradab merupakan hasil produksi dari program pendidikan yang berkualitas dan beradab juga. *Kedua*, pendekatan pendidikan secara sosial budaya dapat memperbaiki sistem sosial budaya masyarakat kearah yang lebih baik. Oleh karena itu, perubahan paradigma pembangunan mengharuskan program pendidikan berinovasi untuk membentuk warga negara sesuai dengan kebutuhan negara.

Sedangkan **Apiek Gandamana** membahas tentang bagaimana Memaknai Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Demokrasi merupakan sistem politik yang saat ini digunakan oleh hampir seluruh bangsa dan negara di dunia. Sistem politik demokrasi bukan hanya digunakan oleh negara-negara liberal yang memang menjunjung kebebasan, ternyata sistem politik demokrasi digunakan juga oleh negara-negara berfaham komunis yang menjunjung kebersamaan atau kolektivitas. Negara komunis menyebut demokrasi yang mereka gunakan adalah demokrasi proletar

atau demokrasi rakyat. Berbeda dengan negara kita Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi pancasila, dimana nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi harus dilandasi oleh nilai-nilai pancasila. Dalam demokrasi pancasila selain dilandasi nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, **Nurhadianto** membahas tentang Penerapan Metode Accelerated Learning Sebagai Strategi Guru Untuk menciptakan Pembelajaran PKN yang Efektif dan Menyenangkan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, dengan penggunaan metode *accelerated learning* guru PKN dapat memotivasi pikiran siswa dengan memberikan informasi yang mempunyai dampak bermakna bagi kehidupan siswa, dan memperoleh informasi yang dapat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran, menyelidiki makna, memicu memori siswa, memamerkan apa yang diketahui siswa dan merefleksikan bagaimana siswa belajar baik itu faktor internal maupun faktor eksternal.

Selanjutnya **Risma Sitohang**, mengangkat issue tentang Pengembangan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Proses pembelajaran pendidikan IPS di jenjang tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi khususnya Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) perlu adanya pembaharuan. Karena selama ini pembelajaran masih bersifat konvensional, tidak ada improvisasi dalam pembelajaran dan jauh dari model pembelajaran yang kontekstual. Model pembelajaran kontekstual sangat bagus diterapkan dalam pembelajaran IPS. Model pembelajaran kontekstual ditandai dengan: berorientasi pada kebutuhan dan minat anak, memperhatikan masalah-masalah sosial, lebih mengedepankan keterampilan berpikir daripada ingatan atau hafalan, keterampilan inquiri atau menyelidiki, meneliti lingkungan dan menyelesaikan masalah, serta berbasis pemanfaatan lingkungan alam sekitar. Guru-guru IPS diharapkan mulai menggunakan model pembelajaran kontekstual ini demi terwujudnya pembelajaran IPS yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Untuk rubrik "**Analisis Hukum**" dibahas oleh **Dessy Agustina Harahap**, yang mengangkat Issue berkaitan dengan Analisis hukum Terhadap Pajak Parkir: Pintu Masuk Pendapatan Daerah Kota Medan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Pelaksanaan sistem otonomi penuh yang diberikan kepada pemerintah daerah, menyebabkan pengelolaan keuangan daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Kota Medan memiliki sumber pendapatan daerah yang beragam. Salah satu yang menjadi sumber pendapatannya dari penerimaan pajak daerah adalah pajak parkir. Pajak parkir merupakan salah satu cara pemerintah Kota Medan untuk mengisi

kas daerah. Tapi ini menjadi persoalan ketika pengelolaan sistem parkir yang dilaksanakan di Kota Medan tidak profesional dan penuh dengan kecurangan. Pengaturan Pajak parkir di Kota Medan merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian terwujud dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014.

Sedangkan rubrik "**Wacana Demokrasi dan Politik**" yang di tulis oleh *Pristi Suhendro L*, mengangkat Issu tentang Pemahaman tentang Politik islam dan Dunia Barat Terhadap Demokrasi, secara keseluruhan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan arti demokrasi dalam perspektif Islam dan barat dengan memetakan pemikiran beberapa tokoh Islam (seperti Sayyid Qutb, Abu 'Ala Maududi, Sheikh Nuri Fadillah, dll) dan filsuf- filsuf barat (seperti Aristoteles, Socrates, JJ Rousseau, dll). Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam mengartikan demokrasi baik di kalangan barat maupun Islam. Pemikiran barat hampir menghalalkan segala hal terkait demokrasi. Namun tidak demikian dalam pemikiran Islam yang terbagi menjadi 3 yaitu kelompok yang mengatakan demokrasi dan Islam tidak dapat bersatu, kelompok yang mengatakan bahwa Islam dan demokrasi memiliki banyak kesamaan/titik temu, dan kelompok ketiga yaitu kelompok yang mengatakan bahwa demokrasi adalah bagian dari Islam itu sendiri.

Sedangkan, *Prayetno, Budi Ali Mukmin Sarumpaet dan Ramsul Nababan*, membahas tentang Strategi Pengelolaan Potensi Ekonomi Wilayah Perbatasan Indonesia-Singapura Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Wilayah Perbatasan Indonesia-Singapura, terutama selat Singapura, Pulau Batam, dan Pulau Bintan memiliki potensi yang sangat besar. Selat Singapura sebagai contoh, selain menjadi wilayah lalu lintas kapal yang menghubungkan Timur Tengah dan Eropa dengan Asia Timur, ternyata selat Singapura juga memiliki kandungan mineral yang cukup besar. Pulau Batam dan Bintan juga memiliki potensi yang sangat besar di sektor pariwisata, budidaya ikan dan industry. Namun potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut belum optimal memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan di wilayah perbatasan tersebut. Oleh karenanya ada beberapa langkah yang bisa mengefektifkan potensi ekonomi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah memperjelas kebijakan investasi, terutama berkaitan dengan potensi mineral di selat malaka, meningkatkan infrastruktur sebagai daya tarik bagi investor, merubah orientasi dari darat ke maritime

serta menerapkan model Integrated Border Management (IBM) dalam pengelolaan pelabuhan yang berhadapan langsung dengan Singapura.

Diakhir tulisan ini *Julia Ivanna*, mengangkat Issu tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Kumuh dan Pengelolaannya, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Masalah kawasan kumuh perkotaan adalah tidak efektifnya penggunaan lahan bernilai tinggi di lokasi strategis kota serta pemanfaatannya secara ilegal. Sedangkan masalah permukiman kumuh di pedesaan terutama disebabkan oleh faktor kemiskinan. Ada 2 faktor utama yang menjadi pendorong kawasan menjadi kumuh yaitu faktor manajemen kawasan dan faktor penarik ekonomi. Lokasi yang cenderung digunakan sebagai permukiman dan menjadi kawasan-kawasan kumuh adalah lahan-lahan pemerintah dimana manajemen/pengelolaan kawasan tidak terdefinisi dengan jelas antara otoritas kewenangan pengelolaan pusat, provinsi atau daerah. Dibutuhkan suatu usaha Pemerintah untuk merelokasi permukiman kumuh, sosialisasi kebijakan tentang pentingnya peran masyarakat dalam rangka usaha perbaikan perumahan dan permukiman di daerah kumuh serta pengembangan sector informal di bidang perdagangan.

Penyunting senantiasa mengharapkan kepada para akademisi, guru dan peminat kajian kewarganegaraan untuk berpartisipasi mengirimkan naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan dengan kategori Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik.

Harapan kami, Jurnal Kewarganegaraan ini dapat menjadi bacaan ilmiah bagi para penulis dan pembaca pada umumnya, untuk menambah wawasan tentang kewarganegaraan. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para penulis dan tim penyunting yang telah bekerja keras, sehingga Jurnal Kewarganegaraan ini dapat diterbitkan.

Redaksi



**STRATEGI PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI WILAYAH  
PERBATASAN INDONESIA - SINGAPURA UNTUK MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERBATASAN**

**Oleh : Prayetno<sup>\*</sup>, Budi Ali Mukmin<sup>\*\*</sup> dan Ramsul Nababan<sup>\*\*\*</sup>**

*Abstract*

*Indonesia-Singapore border region, especially the Strait of Singapore, Batam Island and Bintan Island has a huge potential. Strait of Singapore as an example, in addition to be the area that connects the boat traffic the Middle East and Europe to East Asia, it also has sizable mineral deposits. Batam and Bintan Island also has a huge potential in tourism, fish farming and industry. However, the potential of the region is not optimal to contribute to increase the prosperity in that border region. Therefore there are several steps that can streamline the economic potential to improve the welfare of the community, including the clear investment policy, especially with regard to mineral potential in the Malacca Strait, improving infrastructure as an attraction for investors, changing the orientation of the maritime and overland to apply the model of Integrated Border management (IBM) in the management of the harbor directly opposite Singapore.*

**Keywords : Improvement, Welfare, Management, Indonesia-Singapore Border**

**A. PENDAHULUAN**

Secara geografis letak perbatasan Indonesia-Singapura cukup strategis sebagai jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Eropa dan Timur Tengah dengan Asia Timur. Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi salah satu jalur teramai di dunia, dan ini merupakan potensi untuk meningkatkan devisa. Namun menurut Nasution (2012) selama ini, potensi yang dimiliki tersebut belum termaksimalkan, karena belum semua memiliki kejelasan wilayah perbatasan, sehingga agak sulit menetapkan kebijakan investasi di suatu daerah yang belum memiliki landasan hukum yang kuat. (Ade P Nasution Jurnal Dimensi UNRI).

Selain hal diatas, berdasarkan data Puslitbang Geologi Kelautan Batam, selat Singapura yang menjadi penghubung Indonesia dengan Singapura memiliki kandungan mineral yang cukup besar. Secara geologi, perairan Batam

---

<sup>\*</sup> Prayetno, S.I.P., M.Si adalah Dosen Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negari Medan

<sup>\*\*</sup> Budi Ali Mukmin, S.I.P., M.A. adalah Dosen Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negari Medan

<sup>\*\*\*</sup> Ramsul Nababan, SH adalah Dosen Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negari Medan



merupakan daerah jalur granit yang kaya dengan potensi mineral kuarsa dan timah yang berumur Karbon, Perm dan Trias. Kasiterit (timah) terdapat dalam sedimen yang bervariasi mulai lanau hingga kerikil.

Berdasarkan analisis seismik tersebut memperlihatkan sisa-sisa menambungan pasir laut menyebabkan terkurasnya potensi mineral-mineral ekonomis, seperti: timah, mineral berat dan butiran kuarsa. Akibat lainnya adalah pengikisan dasar laut dan abrasi pantai. Untuk itu, maka perlu dilakukan pemetaan mengenai potensi dari mineral-mineral tersebut sebagai dasar dalam kebijakan dalam pemberian izin kuasa pertambangan agar lebih menguntungkan secara ekonomis.

Menurut Nasution (2012), Potensi yang dimiliki oleh daerah perbatasan Indonesia-Singapura antara lain adalah lokasi wisata di Pulau Batam dan Bintan. Disamping kejelasan kebijakan investasi, wilayah perbatasan Indonesia yang merupakan pintu masuk potensial perlu kiranya berbenah agar memiliki daya tarik bagi investor yang akan menanamkan modalnya di sekitar wilayah perbatasan. Dari data yang dikeluarkan Otorita Batam (OB) tahun 2004 diperoleh gambaran jumlah investasi saat ini mencapai 32 Juta dolar AS. Jumlah investasi berasal dari pemerintah 20 persen, 47 persen dari swasta domestik, dan 33 persen investasi swasta asing. Artinya jumlah investasi yang ditanamkan di wilayah perbatasan masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah tersebut (Ade P. Nasution, Jurnal Dimensi, UNRI).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Batam (2010) Struktur Perekonomian yang tergambar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Propinsi Kepulauan Riau (KEPRI) yaitu sebesar 53,53 % yang menyumbang Rp. 2.014.048.080.000 dari total PDRB sebesar Rp. 3.762.584.520.000 sedangkan sektor pertanian hanya menyumbang 6 % dalam PDRB dan sektor pertambangan dan Penggalian hanya menyumbang 6,2 %. Padahal potensi terbesar dari Propinsi Kepri adalah pertanian dan

pertambangan. Dari sudut permasalahan sosial Pekerja sektor informal yang terbesar adalah di Kabupaten Natuna yaitu 83 % dan Kepulauan Riau 48,1% sedangkan di Kota Batam hanya 24,1 %. Hal ini relevan dengan kontribusi sektor Industri pengolahan diatas, dimana pada sektor industri pengolahan pekerjanya bersifat formal, sedangkan sektor informal biasanya ditandai dengan sektor pertanian. Dari data kuantitatif diatas, kita melihat bahwa memang telah terjadi ketimpangan baik struktural maupun ekonomi. Faktor utama yang menyebabkan masalah tersebut adalah sebaran penduduk yang tidak merata dan ditambah dengan kebijakan bidang ekonomi yang memprioritaskan Batam sebagai basis perekonomian seperti industri, perdagangan, pariwisata dan juga dalam infrastruktur. (BPS Batam 2005).

Oleh karena itu pemerintah baik pusat maupun daerah harus serius menangani berbagai macam tantangan dan peluang tersebut, terutama dalam hal pengelolaan sektor-sektor ekonomi strategis di wilayah perbatasan.

## **B. KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGELOLA POTENSI PERBATASAN INDONESIA-SINGAPURA**

### **1. Memperjelas Kebijakan Investasi**

Untuk dapat merealisasikan potensi ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Singapura ini, maka pemerintah (baik pusat maupun daerah), kalangan pengusaha (swasta), perbankan, dan masyarakat (terutama yang berada di sekitar Batam dan Bintan) selayaknya bahu-membahu secara sinergis, produktif, dan kreatif dengan melaksanakan perannya masing-masing. Keberhasilan sektor ekonomi secara makro di Batam belum disertai dengan meningkatnya kesejahteraan warganya, ratusan ribu warga Batam masih tinggal di rumah-rumah liar yang kumuh dengan anak-anak usia sekolah yang terpaksa harus bekerja membantu meringankan beban orang tuanya. Hal ini antara lain disebabkan belum cukupnya akses warga Batam untuk aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi sektor formal yang menuntut berbagai persyaratan tertentu seperti keterampilan dan pendidikan. Keberadaan sektor industri manufaktur di Kota Batam sampai saat ini hanya mempunyai manfaat sekedar penyerapan

tenaga kerja murah saja, namun dalam fungsi mensejahterakan masyarakat, manfaat tersebut belum begitu signifikan dirasakan terutama bagi masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah (Batam Pos).

Dari data yang dikeluarkan Otorita Batam (OB) tahun 2004 diperoleh gambaran jumlah investasi saat itu mencapai 32 Juta dolar AS, sedangkan pada tahun 2011 tercatat mencapai US\$ 105 juta. Jumlah investasi berasal dari pemerintah 20 persen, 47 persen dari swasta domestik, dan 33 persen investasi swasta asing. Dari nilai investasi yang ditanamkan pihak swasta, sektor industri menjadi sektor unggulan yang menyerap tak kurang 50 persen. Menyusul kemudian investasi di bidang perdagangan dan jasa, perumahan, pariwisata, dan baru kemudian pertanian termasuk di dalamnya sub sektor perikanan termasuk perikanan laut. Secara lengkap kegiatan perekonomian Batam yang mencerminkan struktur ekonomi di kawasan ini adalah 71,60 % merupakan industri pengolahan, 11,13 % perdagangan, hotel dan restoran, 4,90 % sektor keuangan, 3,47 % aktivitas ekonomi di bidang pengangkutan dan komunikasi, 3,28 % bangunan, 1,99 % bergerak di bidang jasa-jasa dan 1,62 % aktivitas ekonomi pertanian (BPS Batam, 2004).

Jika dilihat kecilnya nilai investasi di Batam tidak terlepas dari belum optimalnya kebijakan investasi mengacu pada pola pengembangan Batam sebagai area *Free Trade Zone* (FTZ). Dalam harian online bisnis kepri.com disebutkan, walaupun sudah memiliki status sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, bukan berarti segala urusan di Batam bisa lebih gampang dan murah. Keadaan bahkan semakin parah dengan skala pungutan yang lebih besar tergantung jenis urusan. Seorang pengusaha sub-kontraktor di perusahaan asing mengaku harus membayar Rp. 26 juta untuk mengurus dokumen pemasukan barangnya dari China. Itu belum termasuk dokumen untuk perpanjangan masa kerja ekspatriat yang bekerja di perusahaan itu yang nilainya Rp. 6 juta. Birokrasi perizinan yang diperlama dan dipersulit juga menjadi modus bagi aparatur pemerintahan untuk memungut biaya ekstra dari pengusaha. Siapa yang protes, siap-siap barang ditahan di pelabuhan. Itu sebabnya survei Doing

Business yang dilakukan Bank Dunia menempatkan Kota Batam di urutan ke - 15 dalam daftar kota yang memiliki iklim bisnis terbaik. Batam justru kalah dibandingkan kota-kota lain di Indonesia yang sama sekali tidak ada status khusus seperti FTZ.

Dalam riset yang dilakukan Bank Dunia terhadap 20 kota di Indonesia, ada tiga kategori yang disurvei yaitu kemudahan dalam pendirian usaha, izin mendirikan bangunan, dan kemudahan mendaftarkan properti. Dari 20 kota yang dikaji, mendirikan usaha menghabiskan rata-rata 9 prosedur, 33 hari dan biaya 22% dari pendapatan perkapita nasional. Temuan ini 13 hari lebih cepat dan 8% lebih murah dibandingkan dengan pengukuran yang dilakukan dua tahun lalu. Namun demikian secara keseluruhan, Indonesia masih tertinggal jauh dari rata-rata *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC). (Adi Sumardiman, 2002).

Pengusaha Indonesia harus menunggu hampir 1 bulan lebih lama dibandingkan dengan pengusaha di Malaysia dan menghabiskan waktu 4 kali lipat lebih lama dibandingkan dengan pengusaha di Thailand untuk mendirikan usaha. Di negara – negara yang berada di jajaran terdepan sebagai pelaku reformasi terbaik di kawasan ini – Selandia Baru, Australia, dan Singapura mendirikan usaha membutuhkan waktu tidak lebih dari 3 hari dan biaya yang tidak lebih dari 1% dari pendapatan per kapita. Selain dari biaya pendirian usaha yang dikenakan secara langsung, para pengusaha Indonesia juga wajib menyetorkan uang sebesar Rp12.500.000 atau setara US\$1.201 atau setara dengan 46,6% pendapatan perkapita sebagai modal disetor minimum. Sebagian besar dari Negara-negara anggota APEC telah menghapus persyaratan ini. (Bisnis Kepri.com).

Sementara itu pada artikel Bisnis Indonesia, 11 Januari 2012 disebutkan bahwa, beberapa indikator dalam pengurusan perizinan itu adalah prosedur, waktu, biaya, dan modal disetor minimum. Survei tersebut menyebutkan lama waktu pengurusan perizinan di Batam mencapai 39 hari dengan biaya sebesar 22,7% dari pendapatan per kapita. Batam masih lebih baik karena Jakarta justru

lebih lama lagi yaitu 43 hari. Dengan kondisi seperti itu saja, total nilai realisasi investasi asing di kawasan bebas Batam selama 2011 tercatat mencapai US\$ 105 juta. Data BP Batam menunjukkan perkembangan realisasi investasi dilihat dari penerbitan Izin Usaha Tetap (IUT) pada tahun 2011 lebih besar jika dibandingkan tahun 2010. Pada 2011 untuk penanaman modal asing mencapai 91 Penanaman Modal Asing (PMA) dengan total nilai investasi US\$105 juta. Sementara realisasi pada 2010 tercatat 58 PMA merealisasikan aplikasi investasinya dengan nilai US\$72,5 juta.

Berkaitan dengan kekayaan alam yang berada di selat Singapura (perbatasan laut Indonesia-Singapura), perlu adanya kejelasan tentang batas wilayah kedua negara. Ada tiga titik Berkaitan dengan perbatasan Laut antara Indonesia dengan Singapura (P. Nipah - P. Tuas, Batam - Changi dan Bintan - P. Batu Puteh (masih tumpang tindih klaim dengan Malaysia). Penetapan garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura dilakukan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 15 Konvensi Hukum laut tahun 1982 telah mengatur secara garis besar tentang bagaimana melakukan pembagian perairan teritorial antara negara-negara yang berbatasan.(Sefriani Jurnal Fenomena 2005).

Meskipun cara pembagian tersebut mengarah pada suatu pembagian secara *equidistant*, menurut Adi Sumardiman (2002) dalam prakteknya belum tentu dapat dilakukan secara demikian. Kedua negara akan mengalami kesulitan dalam kesepakatan mengenai bagaimana masing-masing negara menetapkan *baselines* yang relatif panjang yang dapat menutup suatu perairan kepulauan yang luas, sedangkan negara yang lain bukan suatu bentuk negara kepulauan. Kesulitan tersebut telah terbukti pada tata cara penetapan perbatasan laut teritorial antara Indonesia-Singapura di selat Singapura.

Pada tanggal 10 Maret 2009, Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian pada segmen barat Selat Singapura. Kesepakatan itu dicapai setelah perundingan empat tahun intensif antara dua negara. Kesepakatan tentang batas-batas maritim adalah yang kedua untuk Singapura dan Indonesia. Yang pertama kesepakatan ditandatangani pada tahun 1973 delimitasi laut teritorial antara

Singapura dan di Indonesia Pulau Batam. Pada perjanjian kedua ini, Indonesia dan Singapura telah berhasil menyetujui tiga titik balik tambahan, dan memperluas segmen sedikit lebih jauh. Dengan demikian permasalahan berbatasan laut Indonesia dan Singapura pada titik tersebut tidak lagi menjadi polemik yang bisa menimbulkan konflik. Dengan telah diratifikasinya perjanjian ini, maka langkah ke depannya adalah meningkatkan kerja sama bilateral bagi pengelolaan kawasan perbatasan dimaksud, termasuk terkait dengan isu keamanan navigasi, lingkungan hidup, dan pemanfaatan sumber daya alam dan kemungkinan untuk mengintegrasikan wilayah perbatasan tersebut dalam satu pola. Namun demikian masih ada beberapa titik perbatasan yang belum disepakati dan masih terbuka peluang terjadinya konflik kedua negara, antara lain batas laut wilayah di segmen timur (Batam-Changi).

Dengan adanya kepastian wilayah perbatasan akan menjadi modalitas untuk melakukan eksplorasi potensi mineral di selat Singapura, dan calon investor akan memiliki kepastian usaha. Pemerintah seyogianya memandu dengan cara mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan peluang investasi baik di Selat Singapura maupun di daratan seperti halnya Batam dan Bintan. Potensi yang dimiliki tersebut tidak akan mampu memberikan nilai positif bagi negara dan masyarakat apabila tidak ada kepastian hukum berupa kebijakan yang jelas.

Sementara itu, menurut syefriani (dalam Jurnal Fenomena, 2005), hal lain yang perlu disiapkan oleh pemerintah adalah mempersiapkan infrastruktur yang mampu menunjang kebutuhan bagi investor, sehingga mereka berani dan kreatif berinvestasi/menanamkan modalnya di wilayah perbatasan. Dalam hal ini, tentu saja akan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kreatifitasnya.

## **2. Meningkatkan Infrastruktur**

Berkaitan dengan Infrastruktur di daerah perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam dinilai pengusaha masih buruk, menyebabkan tingginya biaya produksi yang memicu keraguan investor asing untuk menanamkan modalnya. Itu terlihat dari kondisi jalan di berbagai kawasan

industri Batam seperti di Tanjung Uncang yang sampai saat ini belum diaspal. Hal ini diungkapkan oleh seorang pengusaha yang menyatakan "Saya membayar pajak hampir dua miliar rupiah per tahunnya, ironisnya kondisi jalan di sekitar perusahaan saya yang juga terdapat puluhan perusahaan galangan kapal milik asing belum diaspal lalu di kemana pajak yang kami setor tersebut.

Disamping memperbaiki infrastruktur penunjang untuk investasi, juga perlu membuat Kawasan industri perikanan terpadu yang dilengkapi dengan pelabuhan perikanan bertaraf internasional dan armada kapal penangkapan ikan modern serta pelabuhan bertaraf internasional sebagai penyanggah pelabuhan Singapura. Sehingga ini menjadi daya dorong untuk merubah orientasi wilayah perbatasan Singapura-Indonesia, tidak lagi berorientasi ke darat tapi ke maritim. Pemerintah pusat mestinya mengontrol penggunaan anggaran di daerah karena sebagian besar APBD digunakan untuk belanja pegawai bukan untuk pembangunan infrastruktur. Akibatnya, infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya kota Batam menjadi terlantar dan pengusaha dirugikan. Kondisi infrastruktur yang buruk menyebabkan biaya produksi menjadi sangat tinggi sehingga perusahaan di Batam tidak mampu bersaing dengan perusahaan di negara tetangga seperti China, Vietnam dan Singapura, contohnya biaya transportasi. Biaya transportasi yang harus dikeluarkan setiap perusahaan galangan kapal di Batam saat barang atau kapal telah masuk ke daerah tujuan di Indonesia sangat tinggi yakni mencapai 70 persen, padahal biaya transportasi dari perusahaan asing di luar negeri ke Batam hanya 30 persen. (Batam Pos, 7 Maret 2012).

Pemerintah, baik secara politik maupun teknis, mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sementara pekerjaan sektor formal yang diciptakan industri dan pemerintahan tidak bisa menyerap tenaga kerja lagi, maka sektor informal seperti usaha kecil menjadi alternatif untuk penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Sudah semestinya pemerintah pusat dan daerah yang mempunyai wewenang pengalokasian lahan untuk memberikan *space*

(ruang) lahan bagi pelaku usaha kecil dengan memperhatikan aspek pasar dan letak strategis. Tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat sudah merupakan tujuan wajib dari semua tingkatan pemerintahan. Pemerintah pusat misalnya, mencantumkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang di ikuti oleh Daerah-daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk Kota Batam yang merupakan pintu masuk utama di wilayah perbatasan Indonesia-Singapura misalnya, di dalam RPJMD tahun 2011-2016 dalam dua dari enam misinya menyebutkan: *satu*, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dan investasi yang didukung oleh iklim/situasi usaha yang kondusif dan berlandaskan supremasi hukum dan *dua*, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat *hinterland* dan masyarakat miskin melalui penyediaan fasilitas infrastruktur dasar, penataan dan pembinaan usaha sektor informal serta penanggulangan masalah sosial.

Berdasarkan misi ini, pada artikel online batam pos dikatakan bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab untuk membenahi dan mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi yang menyebabkan kemiskinan masyarakatnya. Diantaranya adalah dengan mendorong masyarakat untuk memulai usaha kecilnya agar mereka terlepas dari kemiskinan. Apabila pemerintah baik pusat maupun daerah mampu menerapkan pola pembangunan yang tepat sasaran berdasarkan potensi yang dimiliki, maka kemakmuran beserta segenap dinamika kegiatan ekonomi (manusia), lalu lalang kapal-kapal ikan nasional serta kapal niaga, dan gemerlapnya lampu di wilayah tersebut juga dapat berfungsi sebagai sabuk pengaman (*security belt*) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian kemakmuran dan penciptaan lapangan kerja akan tercipta secara dramatis, kedaulatan dan harga diri (*dignity*) bangsa pun akan kuat serta tegak secara otomatis.

Menurut Sefriani dalam (Jurnal Fenomena 2005), skala prioritas yang mendesak yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam rangka peningkatan



investasi di Batam yaitu pemerintah harus komit dalam menetapkan status kewilayahan Batam, memperbaiki kondisi ketenagakerjaan, dimana jumlah pengangguran di Batam terus meningkat dikarenakan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Meskipun memang pemerintah kota Batam telah membuat rancangan Batam kedepan yang meliputi: a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia daerah, terutama agar dapat mengisi peluang usaha yang ada; b. Mengembangkan potensial ekonomi rakyat dan potensi perekonomian daerah dengan mengkaitkan ekonomi antara pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya; c. Mengembangkan fasilitas/utilitas serta rekayasa sosial d. Mengembangkan infrastruktur fisik kota; dan e. Menciptakan situasi yang kondusif untuk peningkatan investasi strategis, namun ada beberapa hal yang belum ditangani secara baik misalnya, gas alam, illegal fishing, nilai jual hasil laut yang semakin melemah, tingginya suku bunga perbankan di Indonesia, tidak adanya pelabuhan besar (hub-port) dan masalah peradilan bagi kapal-kapal sitaan.

Kalau hal-hal diatas diperhatikan secara serius maka akan memberikan pemasukan bagi perekonomian Kepri. Sementara dalam Tribune batam edisi 15 Maret 2011, Sunoto menambahkan soal strategi dan kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan perekonomian Kepri, yaitu dengan membuat revolusi biru, yakni perubahan konsep berpikir yang terfokus dari darat ke laut. Hendaknya revolusi tersebut menghantar Kepri kepada Minapolitan atau wilayah perikanan. Guna mewujudkan *grand strategy* tersebut, diperlukan sebuah big push dan *leadership* dari pemerintah untuk memimpin gerakan nasional dalam melakukan reorientasi paradigma pembangunan nasional dari basis daratan, yang telah berlangsung hampir 350 tahun (sejak zaman penjajahan), ke basis kelautan (maritim). Konsep pembangunan (development), pertama kali dikemukakan oleh Henry Truman (Presiden AS), ketika Eropa mengalami kehancuran akibat perang. (Tribun Batam, 15 Maret 2011).

Dalam konteks wilayah perbatasan antara Indonesia-Singapura sangat penting kiranya untuk mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat di wilayah

tersebut, karena bisa saja mereka menanggalkan kewarganegaraannya akibat di kehidupan di wilayah tetangga lebih baik.

Mungkin kontennya berbeda, namun dari dua contoh diatas menunjukkan betapa pentingnya untuk mensejahterakan masyarakat agar berefek positif bagi suatu pemerintahan, termasuk didalamnya wilayah perbatasan Indonesia-Singapura, sebab tidak tertutup kemungkinan ketika terdapat peluang untuk hidup sejahtera di negara tetangga, mereka akan menanggalkan kewarganegaraannya dan berganti dengan kewarganegaraan negara tetangga. Berdasarkan potensi diatas, Basis ekonomi yang dapat dikembangkan, antara lain, meliputi perikanan tangkap, *mariculture* (budidaya laut), pariwisata bahari, migas, industri bioteknologi, industri dan jasa maritim, serta industri ramah lingkungan lainnya. Berhubung lokasi pulau-pulau terluar ini sangat jauh (*remote*) dari pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia, maka kegiatan-kegiatan ekonomi yang dikembangkan adalah yang mampu memenuhi *economy of scale* (skala ekonomi).

Oleh sebab itu, menurut Wisnu Yuda AR (dalam jurnal global strategis 2007) sesuai dengan ukuran pulau dan potensi ekonomi (sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan) yang dikandungnya, pola pembangunan mesti mencakup gugusan pulau (lebih dari dua pulau) sebagai sebuah unit pengelolaan (*a management unit*), kegiatan usahanya mesti terpadu dari hulu (produksi), industri pengolahan sampai pemasaran (hilir), dan sesuai dengan daya dukung lingkungan pulau agar pembangunan berlangsung secara berkelanjutan (*on a sustainable basis*). Pola pembangunan sejenis inilah yang telah berhasil memakmurkan penduduk di gugusan kepulauan di Florida (AS), Maladewa, Mauritius, Scyelles, Langkawi, Palau, dan lainnya. Kawasan industri perikanan terpadu yang dilengkapi dengan pelabuhan perikanan bertaraf internasional maupun regional dan armada kapal penangkapan ikan modern. Kalau hal ini dapat direalisasikan, maka diyakini akan mampu memakmurkan wilayah-wilayah perbatasan dan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Jika dilihat, model-model pengelolaan dan pengembangan kawasan/wilayah perbatasan saat sekarang adalah meliputi: 1) Menjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang ke negara tetangga; 2) Membangun kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity*), keamanan (*security*), dan lingkungan (*environment*) secara serasi; 3) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan yang langsung berbatasan secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan; 4) Mengembangkan kawasan budidaya secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat local; 5) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan dan informasi; 6) Meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial, budaya, keamanan dan ekonomi dengan negara tetangga. (Wisnu Yuda AR jurnal global strategis 2007).

### **3. Penerapan model Integrated Border Management**

Menurut Wisnu Yudha, Model yang diyakini lebih tepat untuk diterapkan di wilayah perbatasan Indonesia-Singapura adalah *Integrated Border Management* (Manajemen Perbatasan Terpadu /IBM). Model ini merupakan pengorganisasian dan pengawasan kegiatan lembaga/ perangkat perbatasan untuk memenuhi tantangan bersama dengan cara memfasilitasi pergerakan orang dan barang yang sah dalam rangka menjaga perbatasan yang aman dan memenuhi persyaratan hukum nasional. IBM dapat dibagi menjadi dua kategori: 1) integrasi domestik antara instansi pemerintah di dalam satu negara atau serikat pabean; dan 2) integrasi internasional antara negara tetangga. Kedua negara membutuhkan kerja sama berbagai sektor yang berkaitan dengan masalah perbatasan, pemrosesan paralel, dan koordinasi di pelabuhan, serta titik perbatasan darat dan laut (secara kolektif disebut sebagai pintu masuk) untuk mengoptimalkan efisiensi kolektif lembaga-lembaga perbatasan. (Wisnu Yuda AR 2007).

Dalam kategori pertama, pengelolaan perbatasan terpadu bisa melibatkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayah Indonesia yang berhadapan langsung

dengan Singapura, diantaranya Batam Centre, Sekupang (Batam), dan Pelabuhan Sri Bintan (Tanjungpinang). Keterpaduan prosedur pelabuhan didalam negeri ini penting, agar memudahkan masuknya investasi dan juga devisa dari sector tourism, mengingat intensitas pelaku bisnis dan wisatawan Singapura yang masuk wilayah Indonesia lewat ketiga pelabuhan tersebut semakin meningkat. Untuk kategori kedua, negara tetangga atau tertular otoritas nasional juga harus saling bekerja sama untuk menyelaraskan lintas batas fasilitas dan prosedur. Administrasi Pabean biasanya diarahkan pada pengembangan prosedur terintegrasi untuk pengolahan barang di pintu masuk.

Kebijakan perbatasan dan imigrasi terfokus terutama pada pengelolaan orang di titik-titik masuk serta peraturan dari kedua negara mengenai orang dan barang yang mencoba untuk menyeberangi perbatasan secara ilegal diantara titik masuk. Dengan demikian, penekanan dari IBM ditempatkan dalam proses pabean itu sendiri. Kedua jenis IBM memerlukan batas tanggung jawab yang jelas untuk barang (bea cukai) dan pengolahan penumpang (imigrasi). (Wisnu Yuda AR2007).

Sementara tanggung jawab ini memerlukan operasi yang berbeda (misalnya barang klasifikasi, pembawa dan pemeriksaan barang, pengumpulan pendapatan, dan verifikasi transaksi untuk bea cukai, dibandingkan verifikasi visa, kesehatan, dan anti-penyelundupan untuk imigrasi), evolusi pelatihan dan penggunaan teknologi telah meningkatkan integrasi perbatasan dan semakin memungkinkan petugas perbatasan untuk melakukan kedua fungsi.

Dalam kebanyakan kasus, suatu negara akan mengintegrasikan proses sebelum memulai upaya untuk mengintegrasikan dengan tetangga atau mitra dagang perjanjian. Dalam kaitannya di wilayah perbatasan, inovasi bukan ditujukan untuk bersaing dengan Singapura, justru Indonesia harus mampu memanfaatkan kelebihan yang dimiliki oleh Singapura untuk kebaikan Indonesia. Kalau dalam konteks strategi, Indonesia perlu memakai strategi kooperatif, untuk menggandeng Singapura sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan

Indonesia-Singapura. Salah satu model yang dapat dipergunakan oleh Indonesia dalam melakukan pengelolaan wilayah perbatasan adalah dengan cara menerapkan *Integrated Border Management* (IBM). (Sefriani Jurnal Fenomena 2005).

Indonesia bisa mengajak serta Singapura untuk bersama-sama melakukan pengelolaan secara terpadu di wilayah perbatasan kedua negara, sesuai dengan prinsip berbagi peran, berbagi tanggungjawab dan berbagi benefit dari hasil pengelolaan bersama. Diharapkan proses ini membawa berkah *transfer of knowledge* yang baik dari Singapura dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan khususnya dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Hal ini terutama kerjasama antar pelabuhan yang paling ramai dikunjungi oleh warga kedua negara, yang menjadi pintu masuk investor Singapura ke wilayah Indonesia, khususnya Batam, Bintan dan Karimun, yaitu Sekupang (Batam) dan Pelabuhan Singapura.

Terkait dengan posisi strategis selat Singapura, pemerintah Indonesia selayaknya berupaya untuk meyakinkan pemerintah Singapura akan pentingnya pengelolaan wilayah perbatasan yang terintegrasi, dengan berupaya menjadikan wilayah perbatasan Indonesia-Singapura terutama Pelabuhan Singapura dengan Pelabuhan Batam Centre/Sekupang menerapkan *Integreted Border Management* (IBM).

Menurut syefriani (2005) Manajemen Perbatasan Terpadu (IBM) adalah pengorganisasian dan pengawasan kegiatan lembaga perbatasan untuk memenuhi tantangan bersama untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang yang sah tetap menjaga perbatasan yang aman dan memenuhi persyaratan hukum nasional. IBM dapat dibagi menjadi dua kategori: 1) integrasi domestik antara instansi pemerintah di dalam satu negara; dan 2) integrasi internasional antara negara tetangga.

Kedua jenis IBM membutuhkan kerja sama antar jenis pelayanan di wilayah perbatasan, pemrosesan paralel, dan koordinasi di pelabuhan, dan titik perbatasan darat /pintu masuk untuk mengoptimalkan efisiensi kolektif

lembaga-lembaga perbatasan. Untuk kategori kedua, tetangga atau tertular otoritas nasional juga harus saling bekerja sama untuk menyelaraskan lintas batas fasilitas dan prosedur. Kedua jenis IBM memerlukan batas yang jelas tentang tanggung jawab untuk barang (bea cukai) dan pengolahan penumpang (imigrasi).

Sementara tanggung jawab ini memerlukan operasi yang berbeda (misalnya barang klasifikasi, pembawa dan pemeriksaan barang, pengumpulan pendapatan, dan verifikasi transaksi untuk bea cukai, dibandingkan verifikasi visa, kesehatan, dan anti-penyelundupan untuk imigrasi), evolusi pelatihan dan penggunaan teknologi telah meningkatkan integrasi perbatasan dan semakin memungkinkan petugas perbatasan untuk melakukan kedua fungsi. Dalam kebanyakan kasus, suatu negara akan mengintegrasikan proses sendiri sebelum memulai upaya untuk mengintegrasikan dengan tetangga atau mitra dagang perjanjian. Untuk itulah, sangat penting untuk menerapkan IBM di wilayah perbatasan Indonesia-Singapura. (Endang Indiati Wahyumi).

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah perbatasan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, diantaranya posisi perbatasan (selat Singapura) yang strategis dan mengandung mineral yang cukup besar, posisi Batam yang potensial untuk menjadi penyangga industry Singapura, potensi kelautan yang sangat luas, potensi pariwisata dan ketersediaan lahan untuk merelokasi industry dari Singapura. Namun menurut Sefriani (2005), diantara potensi yang ada belum termaksimalkan pengelolaannya, sehingga belum terlalu besar kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Batam, Bintan dan Kepulauan Riau secara keseluruhan. Ini adalah potret belum maksimalnya pengelolaan wilayah perbatasan di Indonesia, sebab kondisi perbatasan Indonesia-Singapura, dibandingkan dengan wilayah perbatasan lain di Indonesia sebenarnya dianggap lebih maju. Hal ini dikarenakan posisi wilayah perbatasan di daerah lain, relatif lebih memprihatinkan.

Oleh karena itu menurut Sefriani (2005) pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperjelas kebijakan investasi, terutama berkaitan dengan potensi mineral di selat malaka, meningkatkan infrastruktur sebagai daya tarik bagi investor, merubah orientasi dari darat ke maritim serta menerapkan model *Integrated Border Management* (IBM) dalam pengelolaan pelabuhan yang berhadapan langsung dengan Singapura. Dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut, alangkah lebih baik apabila pemerintah mencoba untuk memikirkan bagaimana caranya memiliki badan (lembaga) khusus yang bertanggung jawab atas percepatan pembangunan dan pengelolaan pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan, sehingga kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan akan semakin membaik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ade P Nasutiaon, *Lahan Ekonomi Rente dan Keadilan*, Jurnal Dimensi UNRI 2012.
- Adi Sumardiman, *Hubungan Indonesia Dengan Negara-Negara Asia*, 2002.
- Bisnis Indonesia, *Realisasi Investasi Batam*, 11 Januari 2012, Diakses tanggal 13 Maret 2014.
- Bisnis Kepri.com, *FTZ Batam dan Anomali Iklim Investasii* 2 Maret 2012, Diakses tanggal 13 Maret 2014.
- BPS Batam, *Data Statistik Kependudukan Kota Batam*, 2004, Diakses tanggal 13 Maret 2014.
- BPS Batam, *Data Statistik Kependudukan Kota Batam*, Maret 2005, Diakses tanggal 13 Maret 2014.
- Batam Pos, *Kawasan perbatasan Indonesia-Singapura*, 7 Maret 2012, Diakses tanggal 14 Maret 2014.
- Batam Pos, *Konservasi potensi mineral di perbatasan Indonesia-Singapura*, 24 Mei 2012, Diakses tanggal 14 Maret 2014.
- Endang Indriati Wahyuni, “*Kawasan Perbatasan Entikong-Kabupaten Sanggau-Kalimantan Barat-Indonesia*”, 5 September 2009, <http://citindo.blogspot.com/2009/09>.
- Nukila Evanty, “*Regulasi Tentang Batas Wilayah NKRF*”, *SUARA PEMBARUAN DAILY*, 13 Agustus 2004 <http://www.suara-pembaruan.com/news/2004/08/13/editor/edi1.htm>.

Puslitbang Geologi Kelautan, *Konservasi Potensi Mineral di Perbatasan Indonesia-Singapura.*

Sefriani, *Pengaruh Tenggelamnya Pulau Nipah terhadap Pernjajian Perbatasan Indonesia-Singapura Tahun 1973*, Jurnal Fenomena: Vol. 3 No. 1, 1 Maret 2005.

Tribun Batam, *Pengelolaan dan Pengamanan Wilayah Perbatasan*, 15 Maret 2011, Diakses tanggal 13 Maret 2014.

Wisnu Yudha AR, *Reklamasi Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah RI-Singapura*, Jurnal Global Strategis, Th I, No. 2, Juli-Desember 2007.

WWW.Batam Pos.co.id, *Rancangan pembangunan nasional*, Diakses tanggal 14 Maret 2014.

